

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam proses pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan ialah pengurangan tingkat kemiskinan, oleh sebab itu jika perkembangan ekonomi tinggi maka kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi (Safrianto, 2018). Indonesia adalah negara yang maju secara ekonomi, serta pembangunan ekonominya bertujuan untuk mencapai kemakmuran seluruh lapisan masyarakat. Dalam membangun perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang utama. Karena pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi harus mampu membangun perekonomian kerakyatan yang berkepanjangan, yang akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang cukup luas.

Dalam perekonomian, usaha mikro kecil menengah (UMKM) didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang produktif yang didominasi oleh badan usaha atau individu berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa UMKM dianggap sesuai dengan jenis usahanya. UMKM disusun dan dikelompokkan dalam PP ini karena aturan turunan dari UU Cipta kerja yang mengatur kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM didefinisikan sebagai usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil

Perbedaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah. Dimana istilah UMKM lebih sering dipakai dalam kalangan masyarakat karena telah mencakup ketiga jenis usaha. Bisa dilihat dari sisi pembinaan dan pemberdayaannya, ketiga jenis usaha tersebut ditangani oleh pihak yang tidak sama atau berbeda. Menurut (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah, unit usaha mikro dibina oleh pemerintah Kabupaten dan Kota, sedangkan usaha kecil ditangani oleh pemerintah provinsi. Kemudian usaha menengah ditangani oleh pemerintah pusat atau berskala nasional. Bisa dilihat dari aspek hukum pancasila, usaha mikro kecil (UMK) tidak memasuki dasar hukum. Sedangkan usaha kecil dan menengah (UMKM) pada umumnya wajib mempunyai landasan sebagai dasar hukum.

Usaha Mikro (UM) di Indonesia sangat beragam jenisnya, diantaranya ada usaha di bidang kuliner dimana salah satu bisnis Usaha Mikro (UM) sebagian hasil dari inovasi yang paling luas di sektor makanan dan keuangan serta ukuran bisnis yang relative sederhana, industri ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Bidang bisnis berikutnya adalah fashion, dimana barang-barang seperti pakaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa juga mereka tidak memproduksi barang secara terus menerus, melainkan bertindak sebagai reseller atau pengimpor barang untuk dijual kembali.

Mayoritas wirausaha di Indonesia masih didominasi oleh sektor usaha kecil menengah (UKM) dan usaha rumah tangga, terlebih lagi ketika dihadapkan pada kawasan pedesaan, dimana keberhasilan kegiatan perekonomian masyarakat di perkotaan ataupun pedesaan sebagian besar banyak disokong oleh kegiatan usaha (*entrepreneurship*) yang masih didominasi dengan usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana

produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta variable rumah tangga. Keberhasilan pengembangan kewirausahaan tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri.

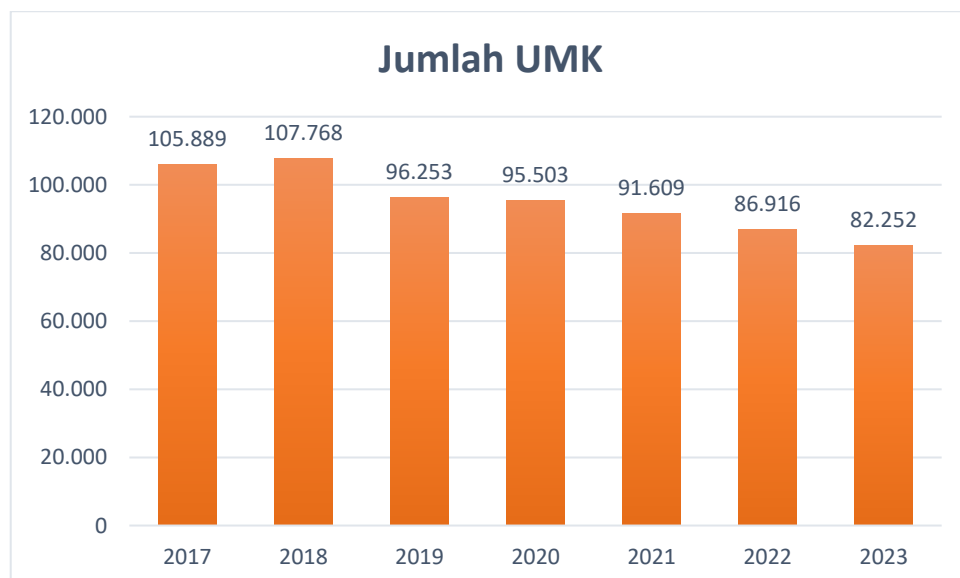
Keberhasilan Usaha Mikro di Indonesia tidak terlepas dari dukungan sektor UMKM di daerah salah satunya yang terdapat di Madura. Madura memiliki berbagai jenis UMK yang tersebar di seluruh 4 kabupaten diwilayahnya. Madura merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang perkembangan UMKMnya cukup baik. Pada tahun 2018 jumlah UMKM di Madura mencapai 1.126.787 UMKM atau 11,51% dari total UMKM di Provinsi Jawa Timur yaitu 9.782.262 UMKM (SUTAS 2018 dan SE 2016). Rinciannya kabupaten Bangkalan 248.664 UMKM, kabupaten Sampang 229.644 UMKM, kabupaten Pamekasan 247.269 UMKM, dan Kabupaten Sumenep 401.210 UMKM.

Perkembangan jumlah UMK Madura salah satunya didukung oleh terhubungnya pulau Madura dengan Pulau Jawa melalui Jembatan SURAMADU. Pembangunan infrastruktur jembatan penghubung antar pulau ini memacu bagi perkembangan daya beli masyarakat baik itu dari wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan UMK di Madura. UMK dinilai mampu meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di Madura.

Kabupaten Bangkalan menjadi kabupaten yang paling dekat dengan kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang menjadi kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta yang mempunyai kelengkapan akses kebutuhan hidup. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memasok akses kebutuhan hidupnya karena adanya jembatan Suramadu. Hal ini menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak UMK yaitu sekitar 82.252 unit UMK pada tahun 2023 yang tersebar di 18 kecamatan. Menurut Iskandar Ahadiyat, Direktur

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMK) Kabupaten Bangkalan, sebenarnya jumlah pelaku UMK di Kabupaten Bangkalan yang mengajukan bantuan modal usaha pada tahun 2022 sebanyak 22.000 orang, tapi hanya 19.000 orang yang lolos administrasi dan verifikasi faktual. Sebanyak 19.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mendapat bantuan dana Rp 1,2 juta dari pemerintah untuk mengembalikan kondisi perekonomian warga setempat akibat pandemi COVID-19. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah penerima bantuan modal usaha yang signifikan bagi UMKM. Pasalnya, hanya 15.000 UMKM di Bangkalan yang bisa mendapat bantuan modal usaha pada tahun 2021. Adanya penambahan 5.000 bantuan dari pemerintah di tahun 2022 (Laili & Fajar, 2022).

Gambar 1.1 Data Jumlah UMK Kabupaten Bangkalan Periode 2017 - 2023



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan, tahun 2017-2023

Berdasarkan data diatas, kondisi UMK di Bangkalan mengalami penurunan di tiap tahunnya, terutama di tahun 2019 mengalami penurunan yang drastis karena munculnya Covid-19. Hal ini didukung dengan adanya Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB). PSBB ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Bangkalan karena masyarakat menjadi tidak leluasa untuk melakukan kegiatan baik sosial, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, kesehatan, terutama di bidang Usaha Mikro Kecil (UMK). Padahal sebelumnya UMK di Kabupaten Bangkalan sempat meningkat karena adanya potensi-potensi seperti; pariwisata Alam, pariwisata Religi, serta adanya Jembatan Suramadu yang menjadi pendorong datangnya wisatawan ke Madura.

Dengan adanya Pembangunan jembatan Suramadu membawa manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat di Madura terutama di Kabupaten Bangkalan antara lain; mendorong pembangunan ekonomi, nilai investasi arus transportasi semakin lancar sehingga mempermudah masyarakat untuk menyebrang dan mendistribusikan barang/jasa ke Pulau Jawa dan sebaliknya. Waktu dan biaya dalam distribusi barang/jasa semakin efektif dan efisien. Jembatan Suramadu ini di resmikan pada tanggal 10 juni 2009 hingga saat ini yang merupakan terpanjang di indonesia dengan panjang mencapai 5,438 kilo meter, dan Jembatan ini memiliki lama pembangunan hingga 7 tahun dan menghabiskan anggaran 4,5 triliun. Jembatan Suramadu ini diresmikan oleh dua presiden yang berbeda yaitu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden yang meresmikan pembangunan dan Susilo Bambang Yudhono yang merupakan Presiden yang meresmikan pembukaannya. Pada konsepnya Jembatan Suramadu di harapkan dapat mengurangi ketimpangan perekonomian kota surabaya dan pulau madura (Maisaroh dan Rohman, 2022).

Pembangunan jembatan Suramadu telah mendorong tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro baru yang berada di sekitar kaki jembatan suramadu di sisi madura. Hal ini terjadi akibat akses jalan yang mudah sehingga mendorong masyarakat melakukan usaha ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan

pendapatan keluarga. Membuat mereka yang aktif dan kreatif mempunyai pekerjaan yang baru juga berpengaruh pada peningkatan pendapatan keluarga. Di sekitar Jembatan Suramadu di sisi Madura terdapat UMK baru yang bermunculan setelah di bangunnya jembatan Suramadu ini.

Dalam persaingan usaha, UMK masih menghadapi tantangan dan hambatan. Tantangan dan kendala yang dihadapi para pelaku UMK dalam meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal pendapatan dan produksi dalam usahanya adalah kurangnya modal yang tersedia. Modal sangat penting untuk memulai atau memperluas usaha. Modal dan biaya yang tidak mencukupi mempengaruhi pendapatan dalam pengembangan usaha. Permodalan merupakan masalah mendasar bagi UMK dengan akses yang terbatas pada sumber keuangan dari lembaga perbankan. Selain keterbatasan modal yang dimiliki, kendala lain yaitu jam kerja dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, kendala-kendala yang mempengaruhi pendapatan Usaha Mikro harus diperhatikan agar pendapatan terus meningkat.

Modal masyarakat yang lemah dapat diartikan sebagai ketidakmampuan masyarakat untuk mengontrol modal yang sebenarnya sudah ada di dalam usahanya. Sedikitnya modal yang di miliki membuat masyarakat berpikir bahwa apa yang mereka miliki bebas untuk digunakan. Modal yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan usaha, mereka pergunakan juga untuk hal pribadi di luar biaya usaha. Biasanya mereka tidak dapat memisahkan dengan baik modal usaha dari pembiayaan usaha terutama pada pedagang kecil yang notabene keadaan perekonomiannya cukup rendah dan paspasan.

Lembaga keuangan memegang peran penting terutama pada penyaluran kredit perbankan untuk mendirikan dan mengembangkan usaha pelaku UMKM. Pentingnya peranan perbankan di kehidupan masyarakat karena bank menjadi

mitra yang langsung terhubung dengan masyarakat, sehingga bank bisa disebut sebagai penggerak perekonomian yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kredit perbankan dapat memudahkan pelaku usaha yang hendak membangun usaha mikro, tetapi sebagian besar belum dapat mengetahui persyaratan pinjaman bank. Oleh karena itu akibatnya pelaku usaha lebih memilih untuk melakukan pinjaman dari rentenir sekalipun dengan bunga yang besar karena saat meminjam, rentenir dapat melayani dengan cepat, mudah dan waktu yang sangat singkat pada saat dibutuhkan (Dwiastuti, 2020).

Kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan, pengelola usaha mikro enggan untuk meminjam ke bank atau lembaga keuangan lainnya, padahal meminjam dan berhutang dari bank atau Lembaga keuangan dapat meningkatkan usahanya, tetapi pemilik usaha berfikir jika pinjaman yang di berikan menjadi beban dalam mengembalikan pinjaman itu.

Usaha Mikro masih memiliki keterbatasan akses pendanaan dari perbankan. Masalah ini berkaitan dengan profil peminjam usaha mikro yang memiliki kemampuan pinjaman rendah atau tidak ada sama sekali atau yang tidak memenuhi persyaratan teknis sistem perbankan. Hal ini masih sulit bagi usaha kecil/baru karena banyak usaha mikro yang enggan memperhatikan kriteria *bankable*. Hal ini mempersulit usaha yang layak untuk mendapatkan modal tambahan dari bank. Usaha mikro gagal memenuhi kriteria penyediaan agunan yang rendah, sehingga belum cukup untuk menjamin jumlah pinjaman yang dibutuhkan (Widiastuti et al., 2017).

Hasil riset yang dilakukan Tampubolon (2007), Artaman (2015), dan Kusumawarda (2014) menyatakan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan, ini berarti bahwa semakin besar pengeluaran Modal Kerja

dalam berdagang maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh pedagang. Kekurangan modal kerja bagi sebagian pedagang akan sangat membatasi kemampuan mengadakan persediaan barang yang cukup. Kata lain modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek. Biasanya modal kerja digunakan untuk beberapa kali kegiatan dalam satu periode.

Jam Kerja merupakan lama waktu yang digunakan untuk menjalankan usaha, yang dimulai sejak persiapan sampai usahanya ditutup. Diasumsikan bahwa semakin lama mereka menekuni usahanya maka peluang untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak daripada mereka yang baru menekuni usahanya. Jika lamanya jam kerja yang diberikan untuk berjualan, probabilitas pendapatan bersih yang didapat pengusaha dapat bertambah meningkat. Begitupun sebaliknya sangat sedikit jam kerja yang diluangkan, pendapatan bersih yang didapat menurun. Apabila ingin menerima pendapatan yang banyak maka dibutuhkan jam kerja yang banyak juga (Anggraini, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan (Silviana, 2021) menyatakan jam kerja yang efektif maupun tertata bisa menghasilkan pendapatan yang didapat membuat dinamis.

Selain itu, Pendidikan Menjadi salah satu bentuk investasi dalam bidang sumber daya manusia yang berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Investasi ini merupakan investasi jangka panjang karena manfaatnya baru dapat dirasakan setelah sepuluh tahun (Atmanti, 2001). Menurut simanjuntak (2001) hubungan peningkatan pendapatan pada Tingkat Pendidikan yaitu karena dengan mengasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas karyawan dan pada akhirnya mempengaruhi peningkatan pendapatan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fadhlani Husaini (2017), yang berjudul Pengaruh Modal Kerja, Lama Usaha, Jam Kerja dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Monza di Pasar Simalingkar Medan, yang menyatakan bahwa variabel modal kerja dan jam kerja secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang Monza di Pasar Simalingkar Medan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari N.N Tri utami Dewi dan Made Suci (2023), yang berjudul Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Kalibukbuk Kecamatan Buleleng, yang menyatakan bahwa modal dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional Kalibukbuk Kecamatan Buleleng.

Berdasarkan riset sebelumnya, pembaharuan penelitian ini menggunakan variabel independent yaitu empat variabel antara lain modal kerja, jam kerja dan tingkat Pendidikan. Sedangkan variabel dependent yaitu pendapatan usaha dalam per bulan serta objeknya yaitu, usaha mikro pada sektor informal di Kabupaten Bangkalan.

Bedasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan (Studi kasus pada usaha mikro di Kecamatan Labang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah modal kerja berpengaruh terhadap pendapatan pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan?

3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap pendapatan pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui pengaruh jam kerja terhadap pendapatan pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat pendidikan terhadap pendapatan pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masing-masing pihak.

1. Aspek Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau bahan untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan usaha mikro di Kabupaten Bangkalan.
 - b. Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai referensi dan masukan konseptual bagi peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tornojoyo Madura.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pendapatan para pelaku usaha mikro, serta melatih pemikiran ilmiah dan menerapkan ilmu yang didapat di perkuliahan pada praktik yang ada.

b. Bagi Pihak Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, khususnya pada isu-isu yang berkaitan dengan pendapatan usaha mikro.